

ABSTRAK

Nama : Dina Amanda, S.H
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi
Minangkabau Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:
344K/Pdt/2004

Tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan tanah warisan turun temurun dari nenek moyang masyarakat Minangkabau yang tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digadaikan dengan syarat-syarat tertentu yang dibenarkan secara adat. Gadai yang dimaksud adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang bersifat sementara, dimana sipenggadai atau disebut juga dengan sipenjual gadai, untuk sementara waktu bukanlah pemilik tanah itu lagi sampai ia menebus gadainya itu dari sipembeli gadai. Karena pemegang atau pembeli gadai adalah pemilik tanah itu makanya ia berhak melakukan perbuatan apapun atas tanah itu, batasannya hanya satu yakni ia tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain untuk selama-lamanya. Konsep gadai tanah di Minangkabau ini perlu untuk dipahami, karena pada dasarnya konsep gadai tanah di Minangkabau berbeda dengan konsep gadai tanah biasa. Hak gadai atas tanah di Minangkabau bukanlah berupa hak jaminan atas tanah sebagaimana berlaku pada hak tanggungan/hipotik, sebab dalam gadai-menggadai tanah di Minangkabau yang digadaikan beralih kekuasaannya (hak miliknya) dan beralih pula penikmatannya kepada pembeli gadai selama masa sebelum ditebusi secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan tanahnya tetap dinikmati oleh pemilik asal. Hukum tanah adat Minangkabau mempunyai aturan sendiri yang mengatur tentang gadai termasuk mekanisme penyelesaian perkaranya jika terjadi sengketa dikemudian hari akibat gadai tersebut.

Kata Kunci:
Gadai, Tanah, Harta Pusaka Tinggi,

ABSTRACT

Name : Dina Amanda, S.H
Study Program : Public Notary
Judul : The Dispute Settlement of The High Inheritance Land's Pawn in
Minangkabau, The Case Study of The Supreme Court Judgement
Number 344 K/Pdt/2004.

The high inheritance land in Minangkabau is a land of hereditary heritage from ancestors of Minangkabau that should not be in traded, shall only be pawned with certain conditions which agreed customarily. That pawning means the tentative legal act of transfer over the land rights, where the people who take in pawn for several time are not the owner of that land until he/she redeem that pawn from the pawn buyer. Because of the pawn buyer is an owner of that land, so he/she get a right to do anything to that land, and the only limit is do not trade that land to anybody else freely at the longest. The concept of pawn in Minangkabau must be understood, because basically the concept of pawn in Minangkabau is different with the usual pawn. The pawn of land rights in Minangkabau wasn't ledge rights like in mortgage, because in pawn of the land in Minangkabau is transferring the ownership and the proprietary and the enjoyment to the pawn buyer as long as redeem's time not be redeemed perfectly, in whereas in the mortgage of land rights still enjoyed by the original owner. The law of the customary land in Minangkabau has own rules which is governing the pawn including the mechanism of the dispute settlement if there's happened in the future because of that pawn.

Key Words:

Pawn, land, high inheritance